

BAB V

PEMBAHASAN

Bab ini pembahasan difokuskan pada hasil temuan lapangan yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian didialogkan dengan teori-teori yang relevan sebagaimana dipaparkan pada bab II. Pembahasan ini diuraikan sesuai dengan fokus penelitian.

A. Perencanaan Kepemimpinan Pondok Pesantren dalam Membangun Budaya Santri di Ponpes Lirboyo Cabang Pagung Semen Kediri

Melalui perencanaan, nilai-nilai dasar, tujuan pembinaan, serta arah pembentukan budaya santri dirumuskan terlebih dahulu sebelum diwujudkan dalam bentuk aturan dan kegiatan pesantren. Berdasarkan temuan penelitian, perencanaan ini tidak disusun secara tertulis dalam bentuk dokumen, melainkan dirancang melalui penetapan nilai, tujuan, dan kebijakan yang bersumber dari pengalaman pengasuh Pondok Lirboyo Cabang Pagung, kemudian diselaraskan bersama pengurus melalui musyawarah. Pengasuh memandang bahwa pengalaman tersebut menjadi bekal utama dalam menentukan arah pembinaan santri di pesantren cabang. Dalam proses ini, beliau menegaskan bahwa adab menjadi tujuan utama yang harus ditanamkan kepada santri sejak awal, sebelum santri diarahkan pada penguasaan ilmu pengetahuan. Selain adab, kedisiplinan dalam menjalankan ibadah dan kepatuhan terhadap aturan pesantren juga menjadi tujuan dalam pembinaan santri.

Jika dikaitkan dengan teori manajemen, George R. Terry menjelaskan bahwa perencanaan merupakan proses penetapan tujuan serta langkah-langkah yang akan ditempuh untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam lingkungan pesantren, penetapan adab dan kedisiplinan sebagai tujuan utama pembinaan santri

menunjukkan bahwa pengasuh telah menentukan arah dasar pembinaan sebelum mengatur kegiatan dan aturan pesantren. Dalam Pesantren Lirboyo Cabang Pagung, perencanaan kepemimpinan dimulai dari penetapan nilai yang diyakini sebagai fondasi pembentukan budaya santri. Pandangan ini juga sejalan dengan Richard L. Daft yang menjelaskan bahwa perencanaan mencakup proses mengidentifikasi tujuan organisasi di masa depan serta menetapkan tugas dan penggunaan sumber daya yang diperlukan untuk mencapainya. Dengan demikian, penetapan adab, akhlakul karimah, kedisiplinan ibadah, serta kepatuhan terhadap aturan dapat dipahami bukan sekadar sebagai cita-cita normatif, tetapi sebagai tujuan kelembagaan yang menjadi acuan dalam penyusunan kegiatan, pembagian peran pengurus, dan pembinaan santri secara berkelanjutan.

Dari sudut pandang kepemimpinan, penetapan tujuan budaya santri tersebut mencerminkan peran kiai sebagai penentu arah pesantren. Sondang P. Siagian menyebutkan bahwa salah satu fungsi kepemimpinan adalah sebagai penentu arah, yaitu pemimpin menetapkan tujuan dan langkah strategis organisasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa tujuan budaya santri ditetapkan langsung oleh pengasuh pondok berdasarkan pengalaman dan pandangan beliau tentang pendidikan pesantren. Musyawarah yang dilakukan bersama pengurus tidak dimaksudkan untuk menentukan ulang tujuan, melainkan sebagai sarana penyampaian dan penyelarasan arah pembinaan agar dapat dijalankan secara bersama. Dalam hal ini, fungsi kepemimpinan pengasuh tidak hanya terlihat sebagai penentu arah, tetapi juga sebagai komunikator yang menjembatani gagasan pembinaan kepada para pengurus agar nilai-nilai yang telah dirumuskan dapat dipahami secara sama dan dilaksanakan secara kolektif.

Selain itu, jika dilihat dari fungsi kepemimpinan menurut Veithzal Rivai, musyawarah yang dilakukan bersama pengurus juga menunjukkan adanya fungsi konsultatif dalam kepemimpinan. Fungsi ini terlihat ketika pemimpin membuka ruang dialog dengan bawahannya untuk mendukung pelaksanaan keputusan yang telah ditetapkan. Pada konteks Pondok Pesantren Lirboyo Cabang Pagung, musyawarah bukan berarti mengubah otoritas utama pengasuh dalam menentukan arah budaya santri, melainkan menjadi media konsultasi agar para pengurus memahami tujuan pembinaan dan mampu menerjemahkannya ke dalam praktik pengasuhan sehari-hari. Dengan demikian, perencanaan kepemimpinan di pesantren ini memperlihatkan perpaduan antara otoritas kiai sebagai pemimpin utama dengan pola konsultatif yang mendukung keterpaduan pelaksanaan di tingkat pengurus.

Apabila dikaitkan dengan prinsip-prinsip perencanaan, temuan ini juga relevan dengan pandangan Kurniadi Didin dan Imam Machali yang menekankan tiga prinsip perencanaan, yaitu tanggung jawab, integritas, dan kesadaran diri. Tanggung jawab terlihat dalam kesadaran pengasuh untuk menetapkan arah pembinaan santri secara jelas. Integritas tercermin dari konsistensi pesantren dalam menempatkan adab sebagai prioritas utama pembinaan. Adapun kesadaran diri terlihat dari pemahaman pengasuh terhadap posisi dan tanggung jawabnya sebagai pihak yang menentukan masa depan pembinaan santri di pesantren. Ketiga prinsip tersebut menunjukkan bahwa perencanaan kepemimpinan di pesantren bukan sekadar penyusunan program, tetapi merupakan bentuk kesungguhan moral dan tanggung jawab pendidikan dalam membentuk budaya santri.

Selain dapat dilihat dari sisi manajemen dan kepemimpinan, penetapan tujuan budaya santri juga dapat dipahami dari sudut pandang budaya. Dalam konsep budaya, nilai merupakan unsur utama yang membentuk pola perilaku suatu komunitas. Penekanan pada adab, akhlakul karimah, dan kedisiplinan menunjukkan bahwa pesantren merencanakan pembentukan budaya santri dengan terlebih dahulu menentukan nilai-nilai yang ingin dijaga dan diwariskan. Nilai tersebut kemudian menjadi rujukan dalam seluruh aktivitas santri di lingkungan pesantren. Jika dilihat dari konsep budaya religius, perencanaan kepemimpinan yang menekankan adab, kedisiplinan, dan akhlakul karimah menunjukkan bahwa pesantren sejak awal merancang pembinaan santri dengan berlandaskan nilai-nilai keagamaan yang membentuk sikap dan perilaku santri dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini sejalan dengan pandangan Muhaimin bahwa pengembangan budaya religius berlangsung pada tataran nilai, praktik keseharian, dan simbol-simbol budaya. Dalam konteks ini, perencanaan di pesantren dimulai dari tataran nilai, kemudian diarahkan untuk diwujudkan ke dalam aturan, kegiatan, dan kebiasaan santri.

Perencanaan kepemimpinan dilanjutkan dengan penetapan aturan budaya santri. Berdasarkan temuan penelitian, aturan disusun sebagai pedoman perilaku santri dalam kehidupan sehari-hari di pesantren. Aturan tersebut tidak hanya berkaitan dengan ketertiban di pesantren, tetapi juga disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan santri ketika kembali ke masyarakat. Dalam teori manajemen, perencanaan tidak hanya mencakup penetapan tujuan, tetapi juga penetapan kebijakan sebagai pedoman pelaksanaan. Aturan tersebut dapat dipahami sebagai bentuk kebijakan yang dirancang untuk mendukung tercapainya tujuan pembinaan santri. Dari sisi kepemimpinan, hal ini menunjukkan fungsi pemimpin

sebagai pengarah sekaligus pengendali agar nilai yang telah ditetapkan tetap terjaga dalam praktik keseharian. Dengan demikian, aturan pesantren bukan hanya instrumen disiplin, tetapi juga perangkat pendidikan budaya yang dirancang untuk menanamkan nilai religius dan sosial dalam diri santri.

Selanjutnya, berdasarkan temuan penelitian, perencanaan kegiatan santri dirancang secara bertahap, dimulai dari kegiatan dasar seperti ngaji dan diniyah, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan yang bersifat lebih luas dan praktik, seperti jami'iyah dan keterlibatan santri dalam kegiatan keagamaan di masyarakat. Pola ini menunjukkan adanya strategi kepemimpinan dalam tahap perencanaan, yaitu strategi bertahap (*tadarruj*) yang memastikan kesiapan santri sebelum diberikan tanggung jawab yang lebih luas. Menurut George R. Terry, perencanaan mencakup pemilihan strategi serta penetapan langkah-langkah yang sistematis untuk mencapai tujuan. Dengan demikian, perencanaan kegiatan yang dilakukan secara berjenjang mencerminkan langkah strategis untuk membentuk kesiapan intelektual, mental, dan sosial santri.

Selain strategi bertahap, pelibatan santri dalam kegiatan jami'iyah dan praktik sosial keagamaan menunjukkan adanya strategi pendelegasian (*delegating*) sebagaimana dijelaskan George Yulk dalam konsep strategi kepemimpinan. Santri diberi tanggung jawab untuk mempraktikkan peran keagamaan dengan tetap berada dalam arahan pengasuh dan pengurus. Hal ini memperlihatkan bahwa perencanaan kegiatan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menjadi strategi kaderisasi dalam membentuk kemandirian dan kesiapan santri. Dalam kerangka kepemimpinan, pendelegasian tersebut sekaligus menunjukkan bahwa pesantren

tidak hanya membentuk kepatuhan santri, tetapi juga menyiapkan mereka agar mampu memikul tanggung jawab keagamaan ketika hidup di tengah masyarakat.

Dengan demikian, perencanaan kepemimpinan di Pondok Pesantren Lirboyo Cabang Pagung dalam membangun budaya santri tidak hanya menekankan penetapan nilai dan aturan, tetapi juga memuat strategi bertahap, konsultatif, dan pendelegasian yang terstruktur untuk mewujudkan budaya religius yang hidup dalam praktik keseharian santri.

B. Pelaksanaan Kepemimpinan Pondok Pesantren dalam Membangun Budaya Santri di Ponpes Lirboyo Cabang Pagung Semen Kediri

Berdasarkan temuan penelitian, pelaksanaan kepemimpinan melibatkan peran pengasuh sebagai pemberi arah dan kebijakan, pengurus sebagai pelaksana sekaligus pendamping, serta santri sebagai subjek yang menjalani proses pembiasaan budaya pesantren.

Dalam manajemen, pelaksanaan atau *actuating* dipahami sebagai proses menggerakkan, mengarahkan, dan memotivasi anggota organisasi agar bersedia menjalankan tugas sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Sondang P. Siagian menjelaskan bahwa pelaksanaan merupakan rangkaian kegiatan pembinaan dan motivasi agar bawahan bekerja dengan kesadaran dan keikhlasan. Sejalan dengan itu, George R. Terry memandang pelaksanaan sebagai upaya mendorong anggota organisasi agar memiliki kemauan dan dorongan dalam mencapai tujuan.

Jika dikaitkan dengan temuan penelitian, pelaksanaan kepemimpinan di pesantren ini tidak dijalankan melalui perintah formal saja, tetapi melalui pembiasaan kegiatan yang berlangsung terus-menerus dalam keseharian santri. Pembiasaan kegiatan santri menjadi bentuk utama pelaksanaan kepemimpinan di

pesantren. Hal ini menunjukkan bahwa proses *actuating* tidak hanya berorientasi pada instruksi, tetapi lebih menekankan pada pembentukan kebiasaan yang secara bertahap menginternalisasi nilai dalam diri santri.

Berdasarkan temuan penelitian, santri menjalani rangkaian kegiatan harian, mulai dari sholat berjamaah, sorogan Al-Qur'an, wajib belajar, kegiatan diniyah, hingga murojaah dan kegiatan malam hari. Kegiatan tersebut dijalankan secara teratur sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Pengamatan peneliti menunjukkan bahwa santri secara perlahan terbiasa mengikuti alur kegiatan pesantren sebagai bagian dari keseharian mereka. Proses ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kepemimpinan berlangsung melalui pembiasaan yang berulang, sehingga nilai-nilai yang diajarkan tidak hanya dipahami, tetapi juga menjadi bagian dari karakter santri.

Pelaksanaan kepemimpinan melalui pembiasaan kegiatan santri ini sejalan dengan pandangan Stephen R. Covey yang menekankan bahwa keberhasilan kepemimpinan tidak hanya ditentukan oleh sistem dan aturan, tetapi juga oleh pembentukan kebiasaan (*habit*) yang berlandaskan nilai. Dalam konteks pesantren, pembiasaan ibadah dan kegiatan keagamaan menjadi sarana utama dalam membentuk karakter dan budaya religius santri secara berkelanjutan.

Selain itu, jika dilihat dari perspektif manajemen kepemimpinan, pelaksanaan kegiatan harian santri juga mencerminkan realisasi visi yang telah direncanakan sebelumnya. Peter F. Drucker menegaskan bahwa kepemimpinan yang efektif adalah kemampuan mengubah visi menjadi realitas melalui tindakan nyata. Dalam konteks ini, nilai adab, kedisiplinan, dan akhlakul karimah yang telah

dirumuskan pada tahap perencanaan diwujudkan dalam bentuk kegiatan rutin yang dijalankan secara konsisten oleh santri.

Lebih lanjut, pelaksanaan kepemimpinan melalui pembiasaan dapat dipahami sebagai proses pewarisan budaya di pesantren yang berlangsung dalam kehidupan sehari-hari. Budaya tersebut ditanamkan melalui keteladanan (*modelling*) yang ditampilkan oleh pengasuh dan pengurus dalam bersikap, beribadah, dan berinteraksi, sehingga menjadi rujukan bagi santri dalam membentuk perilaku. Selain itu, pelaksanaan kepemimpinan juga mencerminkan upaya *cultural maintenance*, yaitu menjaga kesinambungan nilai dan tradisi pesantren melalui sikap ta'dzim, kepatuhan terhadap aturan, serta pengajaran kitab kuning, sehingga berfungsi sebagai sarana pembentukan karakter intelektual dan spiritual santri.

Penegakan aturan juga menjadi bagian dari pelaksanaan kepemimpinan dalam membangun budaya santri. Berdasarkan temuan penelitian, penegakan aturan tidak dilakukan secara kaku, melainkan melalui pengingat, teguran lisan, dan pendampingan yang berlangsung di tengah aktivitas santri. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip pelaksanaan menurut Daryanto yang menekankan bahwa bawahan harus diperlakukan sebagai manusia yang memiliki potensi dan perlu dibina, bukan sebagai alat atau mesin. Penanganan pelanggaran dilakukan secara bertahap, dimulai dari tingkat pengurus atau wali kelas, dan dilanjutkan kepada pengasuh apabila pelanggaran dinilai lebih berat.

Dalam fungsi kepemimpinan menurut Sondang P. Siagian, peran pemimpin sebagai komunikator dan mediator terlihat dalam proses pembinaan tersebut. Pengasuh dan pengurus menyampaikan arahan, menjelaskan aturan, serta membuka

ruang komunikasi bagi santri melalui forum musyawarah. Hal ini juga sejalan dengan fungsi konsultatif menurut Veithzal Rivai, di mana pemimpin membuka ruang dialog dua arah dengan bawahan.

Jika ditinjau dari perspektif model kepemimpinan, pelaksanaan kepemimpinan di Pondok Pesantren Lirboyo Cabang Pagung menunjukkan kecenderungan model kepemimpinan paternalistik. Dalam landasan teori dijelaskan bahwa kepemimpinan paternalistik menempatkan pemimpin sebagai figur ayah yang menunjukkan perhatian terhadap kebutuhan dan kesejahteraan anggota organisasi serta memiliki otoritas yang kuat dalam pengambilan keputusan. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa kiai berperan sebagai pengasuh yang membimbing, menasihati, dan melindungi santri melalui pendekatan yang bersifat mendidik dan bertahap. Pola pembinaan melalui keteladanan dan nasihat menunjukkan karakter kepemimpinan yang menempatkan relasi pemimpin dan santri seperti orang tua dan anak.

Di sisi lain, pelaksanaan kepemimpinan juga memperlihatkan adanya unsur kepemimpinan demokratis. Kartini Kartono menjelaskan bahwa kepemimpinan demokratis menempatkan manusia sebagai fokus utama dan memberi ruang keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan. Sejalan dengan itu, M. Ngalim Purwanto menyebutkan bahwa kepemimpinan demokratis tercermin dari kebiasaan pemimpin untuk berkonsultasi dan berdialog dengan bawahannya. Adanya forum musyawarah di pesantren menunjukkan adanya komunikasi dua arah antara pengasuh, pengurus, dan santri, meskipun keputusan akhir tetap berada pada pengasuh pondok.

Dengan demikian, pelaksanaan kepemimpinan dalam membangun budaya santri di Pondok Pesantren Lirboyo Cabang Pagung Semen Kediri dilakukan melalui pembiasaan kegiatan, penegakan aturan, dan pembinaan yang berlangsung dalam kehidupan sehari-hari pesantren. Pola tersebut mencerminkan model kepemimpinan paternalistik yang disertai sentuhan demokratis dalam aspek komunikasi dan pembinaan, sehingga nilai adab dan kedisiplinan tidak hanya diajarkan, tetapi dijalani secara langsung oleh santri dalam keseharian mereka.

C. Evaluasi Kepemimpinan Pondok Pesantren dalam Membangun Budaya Santri di Ponpes Lirboyo Cabang Pagung Semen Kediri

Evaluasi kepemimpinan dalam membangun budaya santri di Pondok Pesantren Lirboyo Cabang Pagung Semen Kediri merupakan bagian dari fungsi pengawasan (*controlling*) dalam manajemen, yang bertujuan untuk memastikan bahwa perencanaan dan pelaksanaan kepemimpinan berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam teori manajemen, George R. Terry menjelaskan bahwa pengawasan (*controlling*) merupakan proses untuk menentukan apa yang telah dicapai (*measuring performance*), membandingkannya dengan rencana (*comparing with standards*), serta melakukan tindakan perbaikan (*corrective action*) apabila terjadi penyimpangan. Sejalan dengan itu, Mockler menjelaskan bahwa pengawasan merupakan suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar, menyusun sistem umpan balik, membandingkan pelaksanaan nyata dengan standar, serta mengambil tindakan korektif guna menjaga efektivitas organisasi.

Jika dikaitkan dengan temuan penelitian, evaluasi kepemimpinan di pesantren ini tidak dilakukan melalui sistem formal yang terstruktur, tetapi lebih menitikberatkan pada pengamatan langsung terhadap kesesuaian antara nilai yang

direncanakan dengan pelaksanaan pembinaan di lapangan. Penekanan pada nilai adab, kedisiplinan, dan kepatuhan sebagai dasar pembinaan menjadi tolok ukur utama dalam proses evaluasi. Hal ini menunjukkan bahwa standar evaluasi yang digunakan bersifat normatif dan berbasis nilai, bukan administratif semata. Dengan demikian, meskipun tidak dituangkan dalam bentuk indikator tertulis, proses evaluasi tetap berjalan melalui perbandingan antara arah pembinaan yang telah ditetapkan dengan praktik keseharian santri.

Evaluasi terhadap pelaksanaan kepemimpinan juga dilakukan melalui pengamatan terhadap kinerja pengurus dalam menjalankan pembinaan serta konsistensi dalam penegakan aturan. Dalam hal ini, fungsi pengawasan sebagaimana dijelaskan oleh Terry tampak pada proses membandingkan pelaksanaan dengan rencana, khususnya dalam melihat sejauh mana aturan dan pembinaan dijalankan secara konsisten. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kepemimpinan telah berjalan cukup baik, namun masih terdapat kebutuhan untuk meningkatkan konsistensi pengurus dalam menjalankan aturan. Hal ini sejalan dengan fungsi pengawasan menurut Suhardi yang menekankan pentingnya mencegah penyimpangan (*preventive control*) dan memperbaiki kesalahan (*corrective control*) agar organisasi dapat berjalan lebih efektif. Ketidakkonsistenan dalam pelaksanaan aturan dapat menjadi bentuk penyimpangan yang perlu diperbaiki melalui evaluasi yang berkelanjutan.

Selain itu, penegakan aturan yang dilakukan secara bertahap dan bersifat mendidik menunjukkan bahwa evaluasi kepemimpinan tidak hanya berorientasi pada hasil, tetapi juga pada proses. Pendekatan ini mencerminkan bahwa pengawasan dalam pesantren tidak dilakukan secara represif, melainkan sebagai

bagian dari proses pendidikan yang bertujuan membentuk kesadaran santri. Dengan demikian, evaluasi kepemimpinan tidak hanya menilai tingkat kepatuhan, tetapi juga efektivitas pendekatan pembinaan dalam membentuk perilaku santri.

Evaluasi kepemimpinan juga dilakukan melalui mekanisme laporan dan koordinasi antara pengurus dan pengasuh. Dalam teori pengawasan, hal ini sejalan dengan bentuk pengawasan melalui laporan (*reporting system*), baik laporan lisan (*oral report*) maupun laporan tertulis (*written report*), yang berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi terkait pelaksanaan kegiatan di lapangan. Melalui sistem laporan tersebut, pengasuh memperoleh gambaran kondisi santri serta pelaksanaan pembinaan, yang kemudian dijadikan dasar dalam memberikan arahan dan menentukan langkah perbaikan. Hal ini menunjukkan bahwa evaluasi kepemimpinan tidak hanya bersifat individual, tetapi juga dilakukan secara kolektif melalui komunikasi dan koordinasi yang berkelanjutan.

Di samping evaluasi internal, kepemimpinan pesantren juga diperkuat dengan adanya evaluasi eksternal melalui kunjungan Dewan Harian Pondok Lirboyo Pusat yang dilakukan secara berkala setiap tahun. Kunjungan ini menjadi bentuk pengawasan eksternal yang bertujuan untuk menilai kesesuaian pelaksanaan kepemimpinan di pesantren cabang dengan nilai dan standar yang berlaku di pondok pusat. Dalam perspektif manajemen, evaluasi eksternal ini merupakan bagian dari upaya menjaga kualitas organisasi melalui kontrol dari pihak yang memiliki otoritas lebih tinggi. Dengan adanya evaluasi eksternal, proses pembinaan tidak hanya dikontrol dari dalam (*internal control*), tetapi juga diperkuat dengan arahan dan standar dari pihak luar.

Namun demikian, dalam pelaksanaannya terdapat beberapa hambatan dalam evaluasi kepemimpinan. Salah satu hambatan utama adalah belum adanya sistem evaluasi yang terstruktur secara formal, sehingga proses evaluasi lebih banyak bergantung pada pengamatan langsung dan pengalaman pengasuh serta pengurus. Kondisi ini memberikan fleksibilitas, namun di sisi lain berpotensi menimbulkan perbedaan persepsi dalam penilaian. Selain itu, perbedaan karakter dan kemampuan pengurus dalam menjalankan pembinaan juga memengaruhi konsistensi evaluasi, sehingga pelaksanaan di lapangan tidak selalu seragam.

Sebagai tindak lanjut dari hasil evaluasi tersebut, kepemimpinan pesantren melakukan berbagai upaya perbaikan melalui pendekatan adaptif, yaitu menyesuaikan metode pembinaan dengan kondisi santri tanpa mengubah arah dan tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa evaluasi tidak hanya berhenti pada tahap penilaian, tetapi berlanjut pada tindakan korektif sebagaimana dijelaskan dalam teori pengawasan. Selain itu, penguatan koordinasi melalui musyawarah antara pengasuh dan pengurus juga menjadi sarana penting dalam merumuskan langkah perbaikan secara bersama.

Dengan demikian, evaluasi kepemimpinan dalam membangun budaya santri di Pondok Pesantren Lirboyo Cabang Pagung Semen Kediri dilakukan melalui pengawasan berbasis nilai yang menilai kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan, pengamatan terhadap konsistensi penegakan aturan, koordinasi internal, serta penguatan melalui evaluasi eksternal. Proses evaluasi ini tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol, tetapi juga sebagai sarana pembinaan dan perbaikan berkelanjutan dalam membentuk budaya religius santri.